KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : BAKN DPR gelar rapat di Hambalang
**Tanggal** : Selasa, 13 November 2012
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia
**Halaman** : 2

Kasus Hambalang

# BAKN DPR Gelar Rapat di Hambalang

**JAKARTA** – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menyatakan telah menggelar rapat untuk membahas hasil audit investigatif BPK terhadap proyek pembangunan Pusat Pengembangan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso mengatakan, rapat ini langsung dilakukan di lokasi pembangunan P3SON Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukannya agar mengetahui pasti permasalahan pembangunan P3SON Hambalang. Meski demikian, dia mengaku pertemuan BAKN tersebut masih bersifat diskusi.

**"Kami sudah mengerahkan 10 auditor. Hasil diskusi final akan kami sampaikan ke pimpinan DPR."**

**SUMARJATI ARJOSO**
Ketua BAKN DPR

"Betul, kami ada pertemuan di Hambalang, tapi itu masih bersifat diskusi. Setelah itu, nanti kami akan membagikan hasil audit investigatif itu kepada pimpinan DPR dan Panitia Kerja (Panja) Hambalang Komisi X DPR," ungkap Sumarjati di Jakarta kemarin.

Setelah itu, ujarnya, pihaknya kembali akan menelaah dan berdiskusi untuk memberikan satu rekomendasi. Sumarjati menyampaikan, kemarin pihaknya sudah menggelar pertemuan pleno anggota BAKN untuk melakukan diskusi final. "Kami sudah mengerahkan 10 auditor untuk menelaah audit Hambalang. Hasil diskusi final akan kami sampaikan ke pimpinan DPR untuk kemudian melahirkan rekomendasi," paparnya.

Seperti diketahui, hasil audit investigasi tahap I BPK ditemukan indikasi adanya kerugian negara sebesar Rp243,66 miliar. Dalam audit investigatif itu, BPK berpendapat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng melakukan pembiaran terhadap bawahannya, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, dalam kontrak tahun jamak dan pelelangan proyek.

Mantan Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengutarakan, kesulitan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menguak skandal dugaan suap proyek pembangunan P3SON Hambalang senilai Rp2,5 triliun lantaran skandal ini sudah terencana dengan sempurna.

"Jadi, lambannya penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan P3SON Hambalang ini bukan semata-mata titik lemah KPK. Hambalang itu prosesnya kongkalikong yang maha sempurna," tandasnya.

Dia menilai, berbeda dengan kasus-kasus korupsi lainnya, kasus Hambalang diduga sudah direkayasa sejak awal, sehingga sulit untuk membuka tabir gelap skandal Hambalang. Mulai perencanaan, proses tender, hingga proses pembangunan yang sudah diatur sedemikian rupa hingga sulit menelusuri letak kecurangannya.

Meski demikian, Said masih menaruh keyakinan bahwa pada waktunya, kasus Hambalang akan terbuka. Dia mengemukakan, kejanggalan proyek Hambalang bisa diamati dari kontraktor proyek tersebut. "Bisa dilihat PT Wijaya Karya yang notabene merupakan jasa kontraktor yang kuat dan berpengalaman di dunia konstruksi, hanya menjadi subkontraktor dari PT Adhi Karya. *Nah*, yang ini diduga untuk memuluskan aliran dana proyek Hambalang. Karena sebagai kontraktor utama, PT Adhi Karya tidak akan berani jika mengucurkan dana proyek ke sejumlah pihak," bebernya.

● **radi saputro**

Perpustakaan DPR-RI